

**IMPLEMENTASI PASAL 19 UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT BENTUK GANTI
KERUGIAN TERHADAP KONSUMEN TELUR AYAM DI KABUPATEN
TABANAN**

Oleh

I Putu Juniardana, NIM 2114101018

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana implementasi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen telur ayam di Kabupaten Tabanan, (2) Bagaimana bentuk ganti kerugian yang seharusnya diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen telur ayam yang mengalami kerugian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan metode *snowball sampling* yakni penarikan sampel didasarkan pada penunjukan atau rekomendasi dari sampel sebelumnya, tidak ada ketentuan pasti dalam bentuk angka atau persentase mengenai jumlah sampel yang akan diteliti dengan besarnya jumlah sampel didasarkan atas titik jenuh. Pengolahan dan analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa implementasi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen telur ayam di Kabupaten Tabanan belum efektif diterapkan oleh pelaku usaha di wilayah hukum Kabupaten Tabanan sehingga berakibat pada lemahnya budaya hukum masyarakat khususnya pelaku usaha terkait pemahaman mengenai kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha. Bentuk ganti kerugian yang seharusnya diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen telur ayam yang mengalami kerugian dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang. Implementasi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen telur ayam di Kabupaten Tabanan terkhusus mengenai bentuk ganti kerugian masih belum berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal tersebut akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat terkait hukum yang berlaku.

Kata Kunci: bentuk ganti kerugian, perlindungan konsumen, pelaku usaha

**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 19 OF LAW NUMBER 8 OF 1999
CONCERNING CONSUMER PROTECTION REGARDING THE FORM OF
COMPENSATION FOR CHICKEN EGG CONSUMERS IN TABANAN
REGENCY**

By

I Putu Juniardana, NIM 2114101018

Legal Studies Program

ABSTRACT

This study aims to determine: (1) How is the implementation of Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection for chicken egg consumers in Tabanan Regency, (2) What form of compensation should be given by business actors to chicken egg consumers who experience losses. The type of research used is descriptive empirical legal research. The determination of the sample used is non-probability sampling with the snowball sampling method, namely the drawing of samples is based on the appointment or recommendation of the previous sample, there are no definite provisions in the form of numbers or percentages regarding the number of samples to be studied with the large number of samples based on the saturation point. Data processing and analysis are carried out descriptively qualitatively. Based on the study, it can be seen that the implementation of Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection for chicken egg consumers in Tabanan Regency has not been effectively implemented by business actors in the jurisdiction of Tabanan Regency, resulting in a weak legal culture in society, especially business actors, regarding the understanding of the obligations and responsibilities of business actors. The form of compensation that should be given by business actors to chicken egg consumers who experience losses can be in the form of a refund or replacement of goods. The implementation of Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection for chicken egg consumers in Tabanan Regency, especially regarding the form of compensation, has not yet been carried out in accordance with the provisions of Article 19 Paragraph 2 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, this is due to the lack of public understanding regarding applicable laws.

Keywords: *form of compensation, consumer protection, business actors*